

KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA KAMARORA B KECAMATAN NOKILALAKI KABUPATEN SIGI

Wiliam Rodolfo Ntee^{1)*}, Rizali Djaelangka²⁾, Richard F. Labiro³⁾

1Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

wiliam@gmail.com

2 Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

rizalidj@gmail.com

3 Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

labirorichard@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang terjadi di lokasi penelitian sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agus Dwiyanto dimana ada lima indikator yang digunakan dalam mengukur Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, Kelima indikator tersebut yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi secara umum pelaksanaannya belum optimal dapat dilihat pada Indikator Produktivitas yaitu pemanfaatan waktu pemerintah desa masih kurang optimal terbukti pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Desa di tahun 2024 belum dikerjakan dan adanya penurunan jumlah pembangunan yang direalisasi oleh Pemerintah Desa dari tahun 2023 dan tahun 2024. Indikator Akuntabilitas dapat dilihat Pemerintah Desa kurang adil dalam mealokasikan pembangunan di tiap-tiap dusun sedangkan Indikator Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas sudah cukup baik dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa.

Kata kunci : Kinerja, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, Akuntabilitas.

ABSTRACT

His research aims to determine the performance of the Village Government in Kamarora B Village, Nokilalaki District, Sigi Regency. The research method used is Qualitative Descriptive, namely providing an overview of the phenomenon or focus of the problem being researched which occurs at the research location according to existing facts. The data collection techniques used were observation, in-depth informant interviews and documentation to collect the required data in the form of primary and secondary data. Meanwhile, there were 7 informants in this study, namely 3 people from the Kamarora B Village Government, 1 person from the Village Consultative Body, and 3 people from the Kamarora B Village Community. The theory used in this research is Agus Dwiyanto's theory where there are five indicators used In measuring the performance of the Village Government in Kamarora B Village, Nokilalaki District, Sigi Regency, the five indicators are Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsiveness and Accountability. Based on the research results, it shows that the performance of the Village Government in Kamarora B Village, Nokilalaki District, Sigi Regency, in general, its implementation is not optimal, can be seen in the Productivity Indicator, namely the use of village government time is still less than optimal, as evidenced by the development programmed by the Village Government in 2024 has not been carried out and there is a decline the amount of development realized by the Village Government between 2023 and 2024. Accountability Indicators can be seen that the Village Government is not fair in allocating development to each hamlet, while the Service Quality, Responsiveness and Responsibility Indicators are quite good in their implementation by the Village Government.

Keywords: *Performance, Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responbility, Accountability.*

Submisi: 28-11-2024

Diterima: 02-12-2024

Dipublikasikan: 14-02-2025

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai visi organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika organisasi. Dengan mengetahui kinerja akan dapat mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi publik, informasi mengenai kinerja akan sangat berguna untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ukuran yang melekat pada suatu organisasi., tetapi harus dilihat juga dari ukuran yang melekat pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Penilaian kinerja dari masyarakat menjadi sangat penting, karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga masyarakat kurang berkordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat

Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit kecil pemerintahan dalam pemerintahan Indonesia, melainkan lebih dari itu, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah ada, lama sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Kewenangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang desa dijelaskan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan ada istiadat Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada didaerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah pemerintah desa sangat berperan untuk kemajuan suatu desa. Hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan organisasi yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa di haruskan untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa seperti melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar desa.

Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti lingkungan yang layak, tersedianya fasilitas umum yang memadai, dan tercukupinya sarana transportasi. Penyediaan infrastruktur tersebut harus dilakukan supaya desa dapat berkembang dan mampu menjalankan rumah tangganya sendiri untuk mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera dan damai. Maka strategi dan program Pemerintah Desa harus dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga harapan serta keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

Keterlibatan Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat memiliki peranan

penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan, pemerintah desa harus mampu menggerakkan dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat demi tercapainya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Peranan kepemimpinan Pemerintah Desa sangat dituntut dalam menjalankan tugasnya di bidang masing-masing agar lebih profesional, terampil dan berdedikasi tinggi dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus menunjukkan kinerja sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai di daerah pedesaan. Pembangunan yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Desa kamarora B adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kamarora B dilaksanakan oleh aparatur desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan baik dan terarah bahkan menjadi maju apabila kinerja pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat merasa kepentingannya terlayani dengan baik dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kamarora B perlu mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga, Kepala Desa bersama aparatur desa lainnya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang berada dilapangan bahwa Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik dapat diketahui dari Teori yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50) yang meliputi aspek Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, dan Akuntabilitas.

Aspek produktivitas, aspek ini belum berjalan dengan optimal karena Pemerintah Desa belum memanfaatkan waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan infastruktur. Apek Kualitas Layanan, aspek ini belum berjalan dengan optimal karena hasil kerja dicapai oleh pemerintah desa berupa pembangunan infastruktur belum sepenuhnya di nikmati oleh masyarakat. Aspek Responsivitas, aspek ini sudah berjalan dengan baik karena dalam menentukan kebutuhan masyarakat pemerintah desa melakukan musyawarah sehingga hasilnya dapat disepakati bersama. Aspek Responibilitas, aspek ini sudah berjalan dengan optimal karena Pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infastruktur, Aspek Akuntabilitas, aspek ini sudah berjalan dengan baik karena Pemerintah Desa sudah transparan terhadap anggaran yang digunakan melalui penyampaian secara lisan melalui Musyawarah Desa dan secara tertulis melalui pemasangan papan rincian anggaran. Akan tetapi pembangunan infastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya merata. Hal ini menjadi fokus kajian yang menarik untuk di teliti di karenakan bahwa Kinerja Pemerintah Desa merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan proses penyelenggaraan pembangunan infastruktur di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian ini di laksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:9) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen), di mana penelitian adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja adalah ukuran atau penilaian terhadap hasil kerja seseorang, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Kinerja mencakup sejauh mana seseorang atau sekelompok orang dapat melaksanakan tugas, memenuhi standar yang diharapkan, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. Penilaian kinerja secara organisasi sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian kinerja maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana tingkat prestasi kerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Demikian halnya dengan Pemerintah Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi diharuskan memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dengan mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa berhasil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kinerja ini diukur berdasarkan hasil yang dicapai dalam pembangunan infrastruktur. Dalam mengetahui Kinerja Pemerintah Desa di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, peneliti akan membahas dengan menggunakan teori Agus Dwiyanto (2006:50) dengan menggunakan lima indikator yang dapat mengukur kinerja pemerintah desa yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, dan Akuntabilitas.

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Di mana input merupakan sumber daya yang digunakan yaitu sumber anggaran dan sumber penggunaan waktu untuk menghasilkan output yaitu pembangunan yang infrastruktur. Semakin baik Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada berupa anggaran dan waktu serta semakin banyak pembangunan yang dapat direalisasikan maka Produktivitas Pemerintah Desa dapat dinyatakan optimal. Produktivitas Pemerintah Desa Kamarora B dilakukan dengan cara melihat pemanfaatan waktu dan anggaran yang digunakan untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur. Dari hasil wawancara yang dilakukan Bersama Kepala Desa Kamarora B dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2023 sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan akan tetapi di tahun 2024 sampai saat ini belum ada pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa hal ini sesuai dengan fakta temuan Peneliti di lapangan bahwasannya tidak ada pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa karena belum ada alat berupa Ekskavator yang digunakan untuk membuat jalan usaha tani. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah desa sudah mengelola anggaran dengan baik dan dilakukan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat sehingga menghasilkan Keputusan Bersama melalui kegiatan musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa.

Pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah desa itu ada jembatan, penambahan pipa, tugu batas desa itu sudah selesai dikerjakan dan di tahun 2024 ini masih akan dikerjakan nantiya Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur memang di tahun ini agak lambat pembangunan dikerjakan karena masalah alat yang digunakan belum tersedia dan itu kami sedang berusaha supaya bisa kami selesaikan agar masyarakat juga bisa menikmatinya. Dari hasil wawancara diatas dan fakta dilapangan yang Peneliti temukan dapat dilihat memang di tahun 2024 ini belum ada pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa sehingga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat karena sampai saat ini masyarakat masih berharap akan dibuatkan Pembangunan Jalan Usaha Tani. Oleh karena itu, tahun 2024 ini ada jalan usaha tani dan itu memang sudah ada anggaran yang keluar untuk pembangunan jalan usaha tani dan itu disampaikan kepada kami pada saat rapat di desa tetapi sampai saat ini belum ada pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa dan kami tanya ke Pemerintah Desa bahwa belum ada alat untuk dipakai melaksanakan jalan usaha tani dan itu

menjadi harapan kami bahwa cepat diselesaikan.

Hasil wawancara diatas dapat dilihat kekecewaan masyarakat karena sampai saat ini belum dibuatkan Jalan usaha tani diketahui bahwa Desa Kamarora B merupakan Desa yang mayoritas pekerjaan petani dan khusus untuk di Dusun satu memang sulit dalam mengeluarkan hasil panen terlebih pada saat musim hujan yang menyebabkan jalan menjadi becek sehingga sulit dilalui oleh kendaraan roda dua sehingga perlu adanya kerja sama dari Pemerintah Desa untuk segera melaksanakan pembangunan jalan usaha tani.

Tabel 1.
Pembangunan Infastruktur Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Pembangunan	Anggaran	Sumber Anggaran	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Jembatan Dusun I	Rp. 222,388,000.00	Dana Desa	Tahun 2023	Sudah terealisasi
2	Saluran pipa Air Bersih	Rp. 38,000,000.00	Dana Desa	Tahun 2023	Sudah terealisasi
3	Tugu Batas Desa	Rp. 16,405,000.00	Dana Desa	Tahun 2023	Sudah terealisasi
4	Jalan Usaha Tani Dusun I	Rp. 141,834,500.00	Dana Desa	Tahun 2024	Belum terealisasi
5	Deker Plat Dusun I	Rp. 10,645,000.00	Dana Desa	Tahun 2024	Belum terealisasi

(Sumber data: APBDES 2023-2024)

Berdasarkan fakta dilapangan dan data yang peneliti temukan terkait indikator produktivitas diketahui tiga pembangunan infastruktur yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa yaitu Jembatan Dusun I, Penambahan pipanisasi, dan Tugu Batas Desa serta di tahun 2024 ada dua pembangunan infastruktur yang di programkan oleh pemerintah Desa yaitu Jalan Usaha Tani dusun I, dan Deker dusun I. akan tetapi sampai bulan November Tahun 2024 belum ada di realisasikan oleh Pemerinta Desa. diketahui bahwa pembangunan Jalan Usaha Tani dan Deker sudah disampaikan kepada masyarakat untuk anggaran yang digunakan dan sesuai pernyataan Pemerintah Desa bahwa bahwa pembangunan Jalan usaha Tani belum dikerjakan karena belum adanya alat berupa ekskavator yang digunakan. Dan juga dari data di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa dimana di tahun 2023 ada tiga pembangunan yang bisa di programkan oleh Pemerintah Desa sedangkan di tahun 2024 hanya dua pembangunan yang bisa di programkan oleh Pemerintah Desa sehingga adanya penurunan dari produktivitas Pemerintah Desa dalam segi ouput yaitu hasil pembangunan.

Kualitas layanan menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organsasi publik. Dengan demikian, kepuasan Masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kualitas layanan Pemerintah Desa menjadi salah satu indikator yang penting karena membahas tentang kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infastruktur yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Layanan yang berkualitas tinggi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ini mencakup segala aspek terlebih khusus program pembangunan infastruktur. Ketika masyarakat merasa puas, mereka lebih mungkin untuk mendukung kebijakan dan inisiatif pemerintah desa. Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infastruktur dapat diketahui melalui kualitas pembangunan yang dihasilkan oleh Pemeritah Desa serta dampak positif kepada masyarakat terhadap pembangunan sehingga memperoleh kepuasan dari masyarakat.

Kualitas pembangunan infastruktur sudah layak untuk digunakan dan tahan lama karena kami melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk melihat pekerjaan yang dikerjakan dan juga Pembangunan infastruktur yang sudah kami realisasikan sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang di desa walaupun untuk jalan usaha tani memang sampai saat ini belum dikerjakan karea tidak adanya alat yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pembangunan infastruktur yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Kamarora B. diketahui bahwa Pengawasan langsung di lapangan memang sangat penting dalam menjamin kualitas pembangunan infastruktur yang layak dan tahan lama. Dengan melakukan pengawasan secara langsung, kita dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pembangunan infastruktur yang berkualitas juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Pembangunan infastruktur di Desa Kamarora B dengan prioritas pada kualitas pembangunan, menggunakan material-material yang tahan lama dan melakukan pengawasan secara langsung pada proses pelaksanaannya. Hal ini sangat penting karena pembangunan infastruktur yang berkualitas dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Kamarora B. dapat dilihat pembangunan jembatan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat Kristen yang beribadah karena akses ke gereja lebih cepat.

Memang penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa, diharapkan pembangunan dapat bertahan lebih lama digunakan. Pembangunan yang berdampak bagi masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti jembatan yang bermanfaat bagi masyarakat karena mudahnya akses untuk ke tempat tujuan. Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi jalannya pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa dankami melihat untuk penggunaan bahan sudah sesuai dengan standar mulai dari perbandingan pasir dan semen, bahan- bahan yang digunakan yang ada sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan yang sudah direalisasikan akan berdampak positif bagi masyarakat karena pembangunan yang dikerjakan pembangunan yang sifatnya kebutuhan yang memang di peruntukan untuk masyarakat.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat mempengaruhi kualitas pembangunan infastruktur, Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi jalannya pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa. dan memperhatikan Standar Penggunaan bahan-bahan yang digunakan dan telah sesuai dengan standar yang ada, sehingga dapat memastikan kualitas pembangunan dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan material yang sesuai, pembangunan infastruktur diharapkan dapat berjalan baik. Selain itu, dampak langsung yang di rasakan oleh masyarakat terhadap pembangunan infastruktur yang sudah direalisasi Untuk pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa memang sudah berdampak bagi kami cuman untuk jalan usaha tani kami juga masih mengeluh karena belum di kerjakan sampai saat padahal anggaran sudah ada dan sudah di sampaikan kepada kami dan kami tanyakan mereka katakan alat belum ada memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa kamarora B.

Pembangunan yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa khususnya penambahan piparnisasi sudah sangat membantu bagi masyarakat karena air merupakan sumber kebutuhan utama bagi manusia sehingga dengan di buatkan Penambahan pipa air bersih di Desa Kamarora B dapat membantu untuk meningkatnya tersedianya akses air bersih langsung ke rumah-rumah tanpa perlu mengambil air dari sumber yang jauh, serta mengurangi risiko penyakit yang ada di Desa Kamarora

B. Pembangunan sudah sangat membantu kami apalagi jembatan di dusun I itu memudahkan kami dalam beribadah di hari minggu karena lebih cepat sampai sebelum adanya jembatan kami masih memutar untuk pergi ibadah.

Pembangunan infrastruktur khususnya jembatan di Dusun I sudah sangat berdampak bagi masyarakat. Dengan adanya Jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Desa dapat memudahkan akses ke berbagai Lokasi termasuk tempat ibadah, sehingga masyarakat dapat pergi dengan lebih cepat dan nyaman serta dengan adanya jembatan, waktu perjalanan menjadi lebih singkat, memungkinkan masyarakat untuk tiba lebih awal dan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Berdasarkan fakta dilapangan dari Indikator Kualitas Layanan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi sudah memberikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas kepada masyarakat dapat dilihat dari pengawasan langsung dari Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sehingga bahan yang digunakan sudah standar yang berlaku serta perbandingan pasir dan semen yang sesuai dapat membantu pembangunan infrastruktur lebih tahan lama dan juga dari segi dampak pembangunan infrastruktur, masyarakat sudah puas terhadap pembangunan khususnya jembatan di dusun I serta Penambahan Papanirsasi akan tetapi untuk pembangunan jalan usaha tani masyarakat masih mengeluh khususnya kelompok tani karena sampai saat ini belum dikerjakan sehingga ini menjaditanggung jawab bagi Pemerintah Desa agar segera merealisasikan pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani.

Aspek responsivitas, Pemerintah Desa dalam melaksanakan musyawarah desa mengumpulkan masukan yang ada dalam hasil musyawarah sehingga dibuatkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Walaupun kebutuhan masyarakat dari pembangunan masih menggunakan skala prioritas tahun 2023 dan ini menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa karena tidak adanya pengembangan program dari Pemerintah Desa Kamaror B kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. Pengembangan program sangat penting untuk melihat perkembangan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa Kamarora B, sehingga Pemerintah Desa terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan di sesuaikan dengan program Pemerintah Desa Kamarora B.

Program pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang diprogramkan merupakan pembangunan yang sifatnya kebutuhan bukan keinginan. Pembangunan yang bersifat kebutuhan merujuk pada upaya untuk memenuhi upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan masyarakat memang banyak sekali kebutuhan masyarakat dan itu kami pertimbangkan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan dan pembangunan yang sudah di kerjakan kami jamin semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa juga untuk mengetahui kebutuhan masyarakat kami selalu mengundang unsur-unsur masyarakat, mulai dari Lembaga adat, tokoh Masyarakat, Lembaga pemberdaya masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, karantaruna, kami selalu melibatkan mereka jadi disitu kami mengambil musyawarah nanti yang mana suara terbanyak dalam musyawarah itu maka itu yang akan sepakati walaupun tidak semua tokoh-tokoh masyarakat yang hadir.

Pembangunan yang sudah direalisasi oleh Pemerintah Desa belum memenuhi kebutuhan Masyarakat. Tidak semua pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang merata bagi masyarakat. Beberapa pembangunan infrastruktur mungkin lebih menguntungkan bagi sebagian masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Sehingga, Pemerintah Desa lebih memprioritaskan pembangunan yang dampaknya menyeluruh bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan dan jembatan di Dusun I karena Tingginya frekuensi penggunaan oleh masyarakat Desa, sehingga menjadi kebutuhan masyarakat yang dampaknya menyeluruh bagi desa.

Pembangunan yang direalisasikan oleh pemerintah desa sudah bermanfaat bagi masyarakat

desa. akan tetapi besar harapan masyarakat untuk di buatkan Jembatan di Dusun I karena jembatan tersebut merupakan salah satu akses untuk masuk ke Desa Kamarora B, jembatan tersebut hanya bisa dilalui oleh pengendara roda dua seperti motor dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, serta jalan yang rusak menjadi keluhan bagi masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa sudah dapat mengadakan Musyawarah Desa dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas kebutuhan masyarakat akan tetapi dari kegiatan musyawarah desa tersebut Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta kelompok masyarakat tidak sepenuhnya hadir dalam kegiatan tersebut sehingga berpengaruh terhadap pengembangan ide dalam menyampaikan masukan dan gagasan dan juga tidak adanya arsip dokumen maupun catatan aspirasi masyarakat yang diketahui bahwa dokumen aspirasi masyarakat berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai harapan, keluhan, dan saran dari masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebutuha yang di anggap sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan pembangunan desa. Pemerintah Desa dalam menentukan kebutuhan masyarakat hanya melalui kegiatan musyarah desa.

Responsivitas merujuk antara keselarasan program kegiatan Pembangunan infastruktur yang di kerjakan oleh Pemerintah Desa dengan dan kebutuhan masyarakat. Responnsivtas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja Pemerintah Desa karena Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditujukan dengan ketidakselarasan antara program pembangunan infastruktur dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukan kegagalan Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.
Daftar Hadir Hadir Musyawarah

No	Nama Daftar Hadir Musyawarah Desa dan penetapan APBDes 12 Febuari 2024					
	Pemerintah Desa		Kelompok Masyarakat		BPD	
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
1	Mesak	Kepalaa Desa	Yasni	Kader	Karel Kabbasi	Ketua BPD
2	Nahor	Kaur Umum	Meri	PKK	Darwis	Anggota BPD
3	Mardan S.sos	Sekretaris Desa	Nasrudin	Limas	Imelda	Sekretaris BPD
4	Endang. H	Kaur Keuangan	Fandi	Limas	Rudy	Anggota BPD
5	Mukhtar	Kasi Kesra	Gede	Limas		
6	Dalton	Kadus II	Yan	Lembaga Adat		
7	Yafet	Kadus I	Irma	Sekretaris Bumdes		
8	Agus Wandu	RT I/Dusun I	Taufik	Ketua LPM		
9	Desi	RT II/Dusun II	Yohanes R. B	Bahbinsa		
10	Darton	Kadus II	Budianto	Ketua tani		
11	Marten	Kaur Perencanaan				
Jumlah	11		9		4	
	61%		90%		80%	

(Sumber: Data sekunder APBDes 2024)

Tingkat kehadiran dari pemerintah desa hanya berkisar 61% Kelompok masyarakat 90% dan Bpd 80 % sehingga dari kehadiran tersebut kurangnya pengembangan program dalam mengetahui keseluruhan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Kamarora B.

Tabel 3.
Skala Prioritas Tahun 2023-2024

No	Skala Prioitas Dari Hasil Musyawarah Untuk Pembangunan Infastruktur Desa Tahun 2023-2024
1	Penambahan Pipa Air Bersih
2	Jembatan Dusun Ii
3	Tugu Batas Desa Dusun III
4	Jalan Usaha Tani Dusun I
5	Gedung Bumdes
6	Rabat Jalan Lorong Iii Dusun I
7	Pembangunan Drainase Dusun Iii
8	Gedung Posyandu Serta Meja Dan Kursi
9	Perbaiki Jalan Perkuburan Dusun I
10	Pengairan Deker Dusun II
11	Pengairan Dan Penggunaan Air Sawah Dusun I

(Sumber data: RKPJMDES Desa Kamarora B Tahun 2023-2024)

Dari tabel diatas dapat diketahui ada sebelas pembangunan infastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat akan tetapi hanya lima pembangunan infastruktur saa yang direalisasikan dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada sehingga hanya lima pembangunan yang direalisasikan dari tahun 2023-2024 dan tahun kedepanya pemerintah desa akan merealisasikan pembangunan yang belum dikerjakan.

Aspek Responibilitas, Pemerintah Desa Kamarora B memiliki setiap aparat desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing, pembangian kerja sangat diperlukan untuk dapat membagi tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing anggota, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Serta tanggung awab dari Pemerintah Desa yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah desa transparan maka Masyarakat lebih cenderung untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan.

Pembangunan, infastruktur sudah dibagi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infastruktur dilakukan secara terencana dan terkoordinasi sesuai pekerjaan yang dilakukan dan dengan kemampuan masing-masing hal Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di desa tersebut dikelola dengan baik dan diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal. Serta adanya tanggung jawab yang diambil Pemerintah Desa melalui pengelolaan anggaran Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi serta adanya mekanisme kontrol dan evaluasi yang diterapkan, yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa sudah bertanggung jawab melalui pelaksanaan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan, dalam hal ini Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat dalam tahan

pelaksanaan pembangunan, dengan melibatkan masyarakat akan membantu memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara transparan, sehingga adanya kepuasan dari masyarakat.

Tanggung jawab masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan sesuai fakta dilapangan dimana masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu program pembangunan infastruktur di Desa dengan adanya partisipasi maka masyarakat sudah bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai masyarakat.

Berdasarkan fakta dilapangan yang peneliti lakukan bahwasanya terkait dengan indikator Responibilitas Pemerintah Desa sudah dapat bekerja sama dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan serta mengawasi pembangunan infastruktur. Dan juga pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembangunan tersebut dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Serta dalam melaksanakan pembangunan infastruktur adanya sistem kontrol dapat diketahui dari pihak Badan Permusyawaratan Desa yang selalu mengawasi jalannya pembangunan sehingga dapat diselesaikan dan juga adanya tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari pemerintah desa masyarakat untuk memudahkan dalam menyelesaikan pembanguunan infastruktur.

Aspek akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak Masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya dapat dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam Masyarakat.

Pemerintah Desa Kamarora B adalah salah satu bentuk organisasi publik yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan berbagai aspek pemerintahan di tingkat desa. Sebagai organisasi publik, pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelayanan berupa pembangunan di Desa Kamarora B termasuk dalam transparan anggaran untuk pembangunan infastruktur sehingga masyarakat puas terhadap pembangunan tersebut.

Pemerintah Desa sudah mempresentasikan kepentingan Masyarakat melalui keterbukaan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat desa. serta adanya pemerataan pembangunan yang di desa diketahui bahwa ada tiga dusun yang ada di desa Kamarora B dan setiap dusun sudah mendapatkan pembangunan infastruktur.

Berdasarkan fakta dilapangan yang Peneliti temui dilapangan terkait dengan indikator Akuntabilitas dari segi pembangunan memang sudah mempresentasikan kepentingan Masyarakat, dan juga pemerintah desa sudah transparan terhadap anggaran yang ada dengan menyampaikan rincian anggaran kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di desa akan tetapi untuk keadilan Pemerintah Desa dalam merealisasikan pembangunan desa Peneliti temui bahwa pembangunan yang direalisasikan lebih berdampak pada Dusun I.

Tabel 4.
Pembangunan Infastruktur 2023-2024

Pembangunan Infastruktur Tahun 2023-2024		
Dusun I	Dusun II	Dusun III
Tugu Batas Desa	Saluran PIPANIRSASI	Saluran PIPANIRSASI
Deker Plat		
Salura PIPANIRSASI		
Jembatan		
Jalan Usaha tani		

(Sumber data: RKPJMDES Kamarora B Tahun 2023-2024)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten sigi secara umum pelaksanaannya belum optimal karena masih ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa Kamarora B. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator pembahasan yaitu pada indikator produktivitas Pemerintah Desa belum merealisasikan pembangunan jalan usaha tani dan deker dusun I hal ini menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan juga belum dikerjakan pembangunan jalan usaha tani dan jembatan mempengaruhi indikator kualitas layanan dimana diketahui bahwa masyarakat belum puas karena belum di buat jalan usaha tani dan juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah desa agar tercapainya kebutuhan seluruh masyarakat. serta pada indikator akuntabilitas pemerintah desa belum melakukan pemerataan pada pembagunan di tiap-tiap dusun akan tetapi di indikator responsivitas dan responbilitas pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik diketahui pemerintah melibatkan masyarakat dalam tahanan perencanaan, dan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. 2006. Refornasi Birokraasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dokumen RKPJMDes Tahun 2023

Dokumen RKPJMDes Tahun 2024

Dokumen APBDes Tahun 2023

TENTANG PENULIS